



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRO SEPRITA DEZA
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 189180

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.375.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m²/120 m² di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 1466 m² di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 137.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SKYWAVE SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, --- SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 39.210.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 85.413.978

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.637.123.978

III. HUTANG Rp. 330.555.555

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.306.568.423

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NOFIENTI**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**
3. NHK : **740937**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	375.000.000
1. Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA KOTA BUKITTINGGI , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
2. Tanah Seluas 107 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.000.000
1. MOTOR, YAMAHA YUPITER Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	25.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	455.000.000

III. HUTANG **Rp.** **110.000.000**

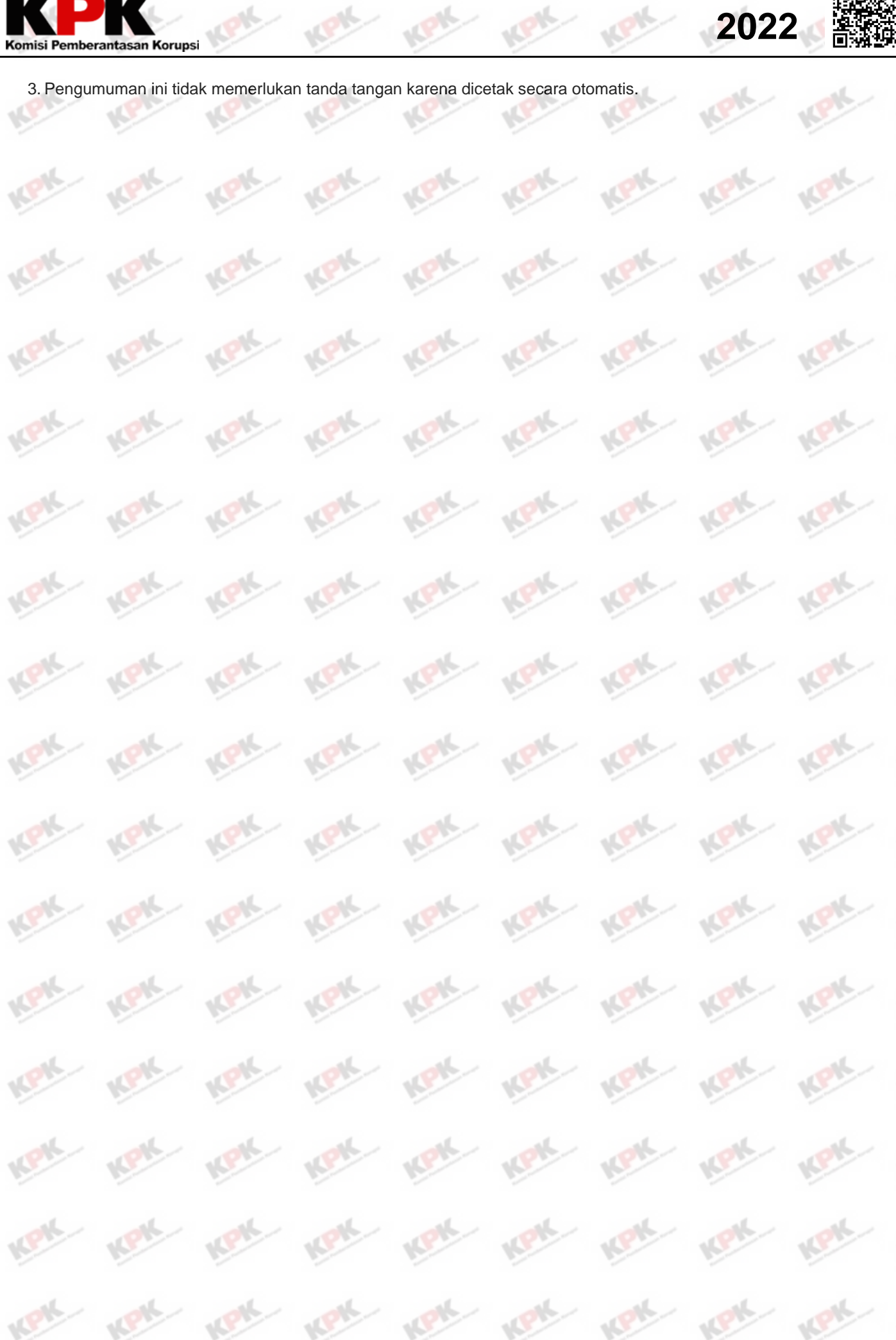
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **345.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARINY ROMARTHA**
2. Jabatan : **BENDAHARA**
3. NHK : **454879**

II. DATA HARTA

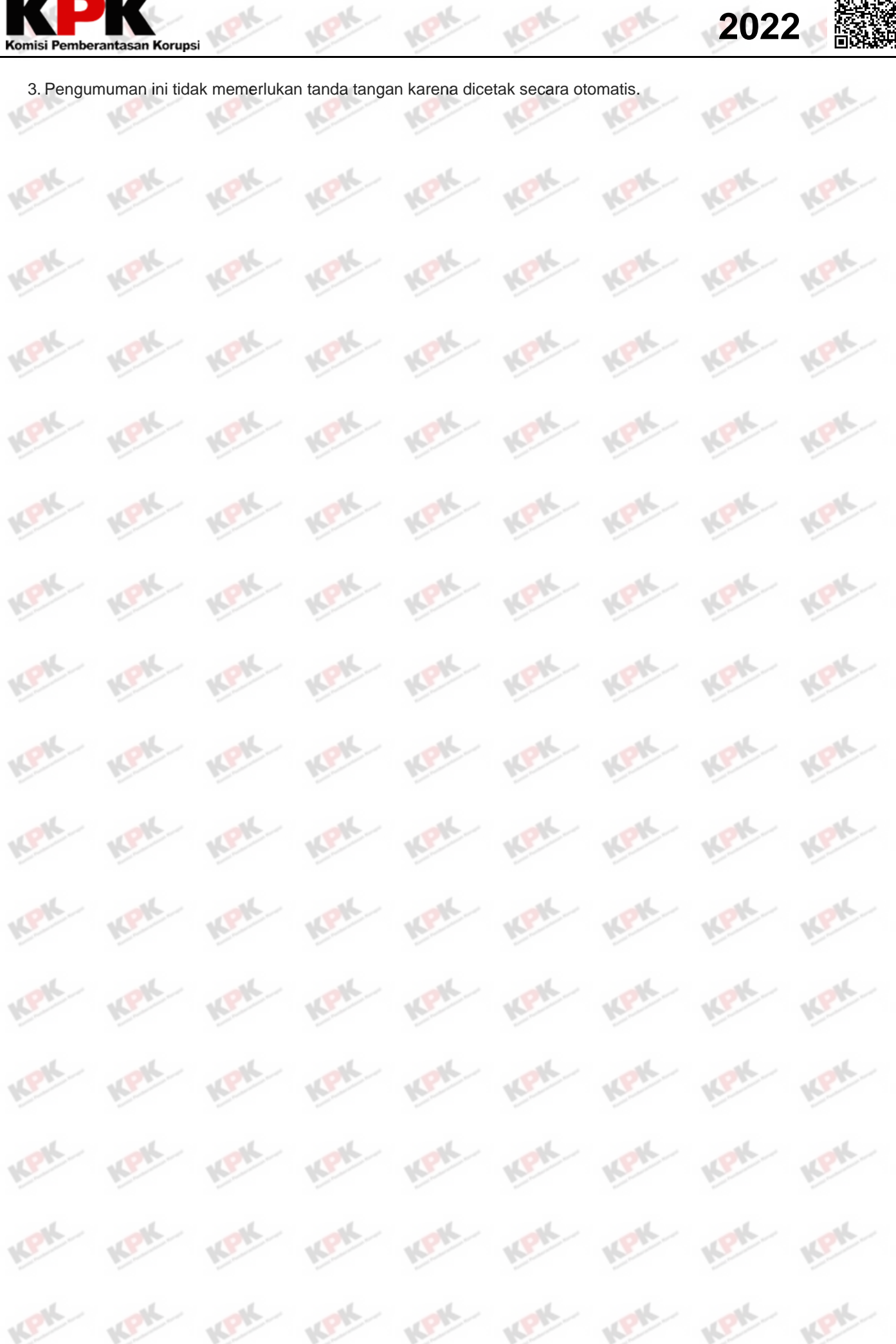
A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	365.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/55 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	81.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AGYA TIPE G Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	40.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	36.600.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	522.800.000
III. HUTANG	Rp.	9.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	513.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI HANDAYANI**
2. Jabatan : **PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)**
3. NHK : **522517**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **535.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/77 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **137.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **2.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **5.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **679.000.000**

III. HUTANG Rp. **128.769.842**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **550.230.158**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.